



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DPRD Sidoarjo Dorong Peningkatan Kesempatan Kerja lewat Job Fair

SIDOARJO-DPRD Sidoarjo terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas kesempatan kerja bagi warga lokal. Melalui sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo, dewan mendorong berbagai langkah konkret untuk menekan angka pengangguran di Kota Delta.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mengatakan, setiap program ketenagakerjaan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat Sidoarjo. Dia mengingatkan agar pelaksanaan job fair benar-benar memberi manfaat bagi pencari kerja lokal.

"Jangan sampai kalau ada job fair, justru yang mengikuti lebih banyak dari luar daerah, sementara angka pengangguran kita masih tinggi," ucapnya.

Menurutnya, angka pengangguran terbuka di Sidoarjo saat ini

masih berada di kisaran 6,49 persen. DPRD bersama Pemkab menargetkan penurunan hingga mencapai lima persen lebih pada tahun 2026 mendatang.

Bagi Nasih, tantangan tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Tak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh stakeholder, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo.

"Makanya ayo bersama-sama, semoga job fair tidak hanya sebatas seremoni, tapi betul-betul berdampak pada penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Melalui fungsi budgeting, DPRD Sidoarjo berkomitmen mendukung penuh kebijakan Disnaker. Dukungan itu juga diwujudkan lewat penambahan anggaran pada pembahasan APBD.

Evaluasi terhadap sejumlah perda ketenagakerjaan pun dilakukan. Tujuannya agar masya-

kat Sidoarjo semakin mudah melamar dan diterima kerja di perusahaan-perusahaan sekitar.

Nasih mencontohkan sektor unggulan di tiap wilayah harus mendapat perhatian serius. Seperti Tanggulangin dengan kerajinan kulitnya, dan Wedoro, Waru, sebagai sentra sandal terbeser di Sidoarjo.

"Kita pernah trauma karena tidak ada pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja lokal, jadi pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah," jelasnya.

Selain itu, DPRD Sidoarjo juga memberi perhatian besar bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diperkuat dengan lahirnya Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penghormatan dan Perlindungan Disabilitas.

"Ini menjadi pedoman dan amanah bersama, bahwa saudara-saudara kita penyandang

disabilitas harus mendapatkan hak yang sama dan perlindungan yang setara," katanya.

Nasih juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah membuka kesempatan kerja bagi kelompok inklusif. Menurutnya, kepedulian itu tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan kemajuan bagi perusahaan.

Tahun depan, pihaknya berkomitmen memperbanyak job fair inklusif bersama Disnaker. Bukan hanya dari sisi pelaksanaan, tetapi juga peningkatan kualitas pelatihan bagi penyandang disabilitas.

"Pelatihan ketenagakerjaan, pengetahuan, dan keterampilan harus diarahkan juga kepada mereka, jadi nanti nyambung antara job fair inklusif dan program pelatihan," terangnya.

Nasih berharap, perusahaan

menjadi garda terdepan dalam pemenuhan hak-hak disabilitas. Dia menekankan bahwa seluruh lingkungan kerja dan fasilitas umum harus ramah disabilitas.

"Sekali lagi, sahabat-sahabat kita penyandang disabilitas memiliki hak dan kesetaraan yang sama, saya yakin kalau kita bersama-sama, kita akan berdaya," tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso mengatakan, pelaksanaan job fair yang digelar Disnaker Sidoarjo sudah berjalan baik. Namun, ia menilai masih ada sejumlah hal yang perlu diperkuat agar lebih sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

"Kami mengawal job fair ini sudah sekian tahun ya, itu memang lumayan membantu Pemda dalam upaya menurunkan angka pengangguran terbuka,"

ungkapnya. Meski demikian, ia menilai masih ada kendala yang perlu dibenahi, khususnya dalam menyelaraskan kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan para pencari kerja. Menurutnya, keterampilan yang dimiliki sebagian pencari kerja belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang dibutuhkan industri.

Menurutnya, Pemkab perlu memperkuat program pelatihan dan job matching agar lulusan pelatihan siap diserap oleh industri. "Perlu kesesuaian antara dunia kerja dan keterampilan pencari kerja, jadi menurut kami, yang perlu ditingkatkan itu job matching-nya dan pelatihannya, dan harus gratis ya," bebernya.

Bangun menambahkan, peningkatan kompetensi masyarakat menjadi kunci keberhasilan

● Ke Halaman 10



DPRD Sidoarjo...

pelaksanaan job fair. Dia berharap langkah tersebut membuat masyarakat lebih siap dan mudah terserap di dunia kerja.

"Kompetensinya nanti disiapkan dulu oleh Pemda dan pelatihannya harus gratis, sebenarnya Sidoarjo sudah menghibahkan tanah ke Kementerian Ketenagakerjaan, harapannya warga Sidoarjo bisa menjadi prioritas, di situ mendapatkan skill dan sertifikat, sehingga ketika ada job fair sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan," terangnya.

Baginya, pelatihan yang telah dilakukan Disnaker sejauh ini sudah cukup beragam dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai program pelatihan seperti las, servis HP, operator alat berat, hingga K3 merupakan langkah positif dalam meningkatkan keterampilan warga.

Terkait pelaksanaan Job Fair Inklusif yang ditujukan bagi penyandang disabilitas, Bangun mengaku sangat gembira. Karena, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kelompok difabel.

"Saya sangat senang, itu merupakan job fair inklusif yang pertama kali di Indonesia mungkin ya, yang digelar untuk anak-anak difabel," imbuhnya.

"Itu juga dalam rangka mengaplikasikan perda yang mewajibkan sekian persen perusahaan mengakomodir tenaga kerja dari kaum difabel," imbuhnya.

Namun, ia mengingatkan agar para pencari kerja dari kalangan difabel juga dibekali dengan keterampilan yang relevan. Dia mencontohkan, pelatihan dasar seperti komputer atau pekerjaan administrasi perlu diperbanyak.

"Saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga harus dibekali keterampilan,

misalnya mengoperasikan komputer atau pekerjaan administrasi yang tidak terlalu berat, jadi keterampilannya juga perlu disiapkan," ujarnya.

Bangun berharap langkah Disnaker Sidoarjo bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Timur. Dia optimistis, program inklusif tersebut akan menginspirasi pemerintah daerah lain untuk melakukan hal serupa.

"Ini di Jawa Timur masih satu-satunya, mudah-mudahan bisa menginspirasi daerah lain," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menilai, peningkatan kualitas pelatihan menjadi kunci utama serapan tenaga kerja. Karena itu, Disnaker diminta menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan industri.

"Setiap pelatihan harus berdasarkan kajian kebutuhan industri, supaya output-nya maksimal," paparnya.

Dhamroni menyoroti target pemerintah daerah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Sidoarjo. Menurutnya, upaya tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

"Harus ada riset, lalu disiapkan formula pelatihan yang tepat, termasuk mendorong program magang di perusahaan yang sesuai," katanya.

Pelatihan barista, rias pengantin, dan menjahit yang sudah berjalan dinilai

positif, namun tetap perlu evaluasi. Dari setiap program, harus jelas berapa peserta yang sudah bekerja atau membuka usaha mandiri.

Menurutnya, Disnaker tak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi dengan dinas lain seperti Dinas Koperasi dan Bank Delta Artha untuk mendukung wirausaha baru.

"Dinas koperasi bisa melakukan pendampingan, semua pihak harus bekerja bersama," pungkasnya. (sa/vga)

Delta Cekli

KEHILANGAN
HILANG BPKB MOTOR YAMAHA LEXY 2018 W 2254 UP AN. TOTOK WIDIONO JL. BROMO 36 PEPELEGI INDAH WARU SIDOARJO

PASANG IKLAN CEKLI?

HUB: 08132000182 (Tmas)

KEHILANGAN

HILANG BPKB MOBIL TOYOTA NEW AVANZA 2020 W 1089 QV AN. TOTOK WIDIONO JL. BROMO 36 PEPELEGI INDAH WARU SIDOARJO



Sebaran Rumah Sakit Belum Merata, Beberapa Kecamatan Masih Kosong



M. SAIFUL, RADAR SIDOARJO

BERKEMBANG: Proses pembangunan RSUD Sedati untuk memperluas layanan kesehatan masyarakat di wilayah Sidoarjo selatan.

SEDATI-Jumlah rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun, sebarannya hingga kini masih belum merata di seluruh wilayah.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, dr. Danang Abdul Ghani, mengatakan saat ini terdapat 32 rumah sakit yang beroperasi di Kota Delta. Jumlah tersebut mencakup rumah sakit milik pemerintah maupun swasta.

"Tahun ini rencananya akan bertambah satu lagi, yaitu RS Mitra Keluarga Sidoarjo yang masih dalam proses perizinan," ujarnya, Senin (27/10).

Meski begitu, pemerataan fasilitas kesehatan tingkat rumah sakit belum sepenuhnya tercapai. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Jabon, Tanggulangin, dan Buduran hingga kini belum memiliki rumah sakit.

"Masih ada kecamatan yang belum terjangkau layanan rumah sakit, sehingga masyarakat di wilayah tersebut harus ke daerah sekitar un-

tuk mendapatkan pelayanan," jelasnya.

Danang menambahkan, jika dilihat dari rasio jumlah tempat tidur terhadap jumlah penduduk, Sidoarjo sebenarnya sudah memenuhi standar nasional. Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), setiap seribu penduduk seharusnya tersedia satu tempat tidur di rumah sakit.

"Kalau dari sisi rasio itu, jumlah tempat tidur di Sidoarjo sudah mencukupi. Artinya, dari kebutuhan fasilitas rawat inap, Sidoarjo masih tergolong aman," terangnya.

Meski secara kuantitas belum mendesak, Dinkes tetap membuka peluang bagi investor yang ingin membangun rumah sakit baru di Sidoarjo. Hanya saja, diharapkan pembangunan diarahkan pada layanan kesehatan spesialis.

"Kalau ada pihak yang ingin membangun rumah sakit, sebaiknya fokus pada layanan khusus, seperti rumah sakit stroke, jantung, cardiac center, atau kemoterapi kanker," tuturnya. (sai/vga)

Aparat Gabungan Turun Bersama Evakuasi Pohon Tumbang di Tulangan



Aparat gabungan mengevakuasi pohon tumbang di akses jalan raya Tulangan.

Sidoarjo, Memorandum

Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Sidoarjo, Minggu (26/10) sore. Di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, cuaca ekstrem tersebut menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menutup sebagian badan jalan.



Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, tumbangnya pohon sempat mengganggu arus lalu lintas. Mengetahui kejadian itu, anggota Polsek Tulangan segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan membantu proses penanganan.

"Setelah berkoordinasi dengan warga atas adanya pohon tumbang, kami segera melanjutkan tindakan bersama tim BPBD dan PLN untuk penanganan agar tidak membahayakan warga dan menimbulkan kepadatan arus lalu lintas," ujar Aiptu Kholim dari Polsek Tulangan.

Petugas gabungan bersama warga kemudian bergotong royong mengevakuasi pohon yang melintang di jalan. Arus lalu lintas pun kembali normal setelah proses pembersihan selesai.

Polsek Tulangan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang bisa menyebabkan pohon tumbang, banjir, maupun gangguan listrik di Sidoarjo. (san/day)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pembebasan Lahan Flyover Gedangan Butuh Rp 80 Miliar

Bakal Dimulai Tahun Depan

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo telah memetakan titik-titik mana saja lahan yang akan dipakai untuk pembangunan *Flyover* (FO) Gedangan. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur itu rencananya dimulai tahun 2026. Perlu Rp 80 miliar untuk kesiapan lahan yang akan dipakai untuk pembangunan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan bahwa hingga akhir tahun ini prosesnya masih dalam tahap pemetaan dan penentuan titik lokasi. "Tahun ini masih dipetakan mana

yang harus dibebaskan karena ada penambahan luasan juga," katanya kemarin (27/10).

Dwi mengatakan untuk pembangunan FO Gedangan membutuhkan luas area yaitu 13.400 meter persegi. Jumlah tersebut naik 1.000 meter persegi dari rencana awal. "Awal itu 12.500-an kalau nggak salah. Terus minta ditambah karena desainnya akan berbelok tidak lurus," tuturnya.

Menurut Dwi, pembebasan lahan untuk FO Gedangan akan menggunakan anggaran APBD. Sedangkan pembangunannya dengan APBN. "Jadi dibagi dua tahun. Untuk tahun ini persiapan lahan dan tahun depan (2026, Red) mulai pembebasan," ujarnya. Pembebasan lahan dilakukan



Tahun ini masih dipetakan mana yang harus dibebaskan karena ada penambahan luasan juga."

Dwi Eko Saptono
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo

secara bertahap. Menurut Dwi, proses pembangunan sangat bergantung kecepatan pembebasan lahan. Jika lahan sudah dibebaskan, maka pengerjaan juga bisa dilakukan secara langsung. Harapannya proyek FO



SEMRAWUT: Banyak pengendara menyerobot yang membuat lalu lintas di perempatan Gedangan sering macet sehingga butuh dibangun flyover.

sudah digarap mulai tahun 2026.

Perlu diketahui, FO Gedangan nantinya dirancang memiliki panjang kurang lebih 600 meter dengan lebar jalan 19 meter. Keberadaannya diharapkan mengurai

kemacetan di jalan nasional. Terutama pengguna jalan yang melakukan perjalanan dari Surabaya-Sidoarjo atau sebaliknya.

Saat ini, sebenarnya sudah ada *Frontage Road* (FR) Gedangan yang sudah di-

fungsikan. Namun kemacetan masih menjadi momok di perempatan Gedangan. Seperti pantauan kemarin. Ada banyak kendaraan yang menerobos lalu lintas dan membuat jalan raya semrawut.

Menurut Dwi, keberadaan FO Gedangan diharapkan bisa memperbaiki kondisi keruwetan. "Nanti juga kami integrasikan antara FO dan FR agar lebih lancar lalu lintasnya," katanya. (eza/hen)

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

TELATEN:
Tauratun, buruh tani di Desa Karongbong, Kecamatan Gedangan, memisahkan gabah dari sisa merang agar bersih. Dia turut senang setelah harga pupuk turun.

Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Mencapai 62 Persen

Petani Sambut Penurunan Harga hingga 20 Persen

SIDOARJO - Kementerian Pertanian (Kementan) telah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan itu disambut baik para petani. Selain sosialisasi, Pemkab juga berupaya mendorong penyerapan pupuk bersubsidi yang hingga 23 Oktober masih 62 persen.

Ayub, petani asal Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, mengaku sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. "Sekarang saya bisa

hemat setiap beli pupuk 50 kilogram. Selain itu juga bisa uangnya dibuat perawatan lainnya," ujarnya kemarin (27/10). Pria 58 tahun itu menyebut, pupuk Urea yang dulu dibeli Rp112.500 kini menjadi Rp90 ribu. Sedangkan NPK dari Rp115 ribu turun menjadi Rp92 ribu.

Menurut Ayub, penurunan harga pupuk bersubsidi akan mengurangi biaya produksi. Sebab selama ini kebutuhan pupuk cukup memang menyulitkan petanian. Harga yang mahal mendorong pengeluaran untuk produksi.

Kepala Dispanperta Sidoarjo Eni Rustianingsih membenarkan adanya kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat. "Per 22 Oktober

kemarin, harga pupuk resmi turun," ujarnya. Harga tersebut, lanjut Eni, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025.

Berdasar data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jatim, hingga 23 Oktober 2025 rata-rata realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Sidoarjo mencapai sekitar 62 persen dari total alokasi. Kebutuhan pupuk Urea tercatat sebesar 9.044 ton dengan alokasi 8.661 ton dan realisasi 5.095 ton. Untuk NPK, dari alokasi 5.689 ton, sudah tersalurkan 4.222 ton atau 74,21 persen. Sedangkan pupuk organik baru tersalur sekitar 5,13 persen dari total alokasi 347 ton. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jumlah Rumah Sakit Cukup, tapi Sebaran Belum Merata

Satu Faskes Direncanakan Beroperasi Tahun Ini

SIDOARJO – Jumlah rumah sakit (RS) di Kabupaten Sidoarjo terus bertambah. Secara angka, jumlahnya sudah dianggap cukup. Meski, sebaran RS dinilai masih belum merata.

Ada tiga kecamatan yang belum memiliki RS. Yakni Kecamatan Jabon, Tanggulangin, dan Buduran. Meski begitu, Dinkes Sidoarjo menilai kebutuhan layanan di wilayah tersebut masih bisa ditopang oleh faskes terdekat. Seperti Jabon dan Tanggulangin ada RS Bhayangkara Pusdik di Porong.

Kabid Pelayanan Dinkes Sidoarjo dr Danang Abdul Ghani menyebut ada 32 rumah sakit yang beroperasi di Sidoarjo. Itu terdiri dari rumah sakit milik pemerintah maupun swasta. "Tahun ini rencananya akan bertambah satu lagi, yakni RS Mitra Keluarga Sidoarjo yang masih dalam proses perizinan," ujarnya kemarin (27/10).

Danang mengatakan, secara rasio jumlah tempat tidur (TT) di rumah sakit terhadap jumlah penduduk Sidoarjo sudah memenuhi standar nasional. Berda-

Perkembangan RS di Kota Delta

- Total ada 32 rumah sakit di Sidoarjo
- Bertambah satu rumah sakit tahun ini
- Tiga kecamatan masih belum memiliki RS
- Pelayanan kesehatan di kecamatan yang tak memiliki RS didukung rumah puskesmas-puskesmas

sarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), setiap seribu penduduk seharusnya tersedia satu tempat tidur di rumah sakit. "Kalau dilihat dari rasio itu, jumlah tempat tidur di Sidoarjo sudah mencukupi," katanya.

Meski tidak mendesak, Danang mengatakan jika penambahan RS tetap diperlukan. Pemkab membuka peluang bagi investor yang ingin mendirikan faskes. "Kami harapkan sebaiknya fokus pada layanan khusus, seperti rumah sakit stroke, jantung, cardiac center, atau kemoterapi kanker," tambah Danang.

Dia menilai keberadaan rumah sakit khusus dengan layanan unggulan tertentu masih dibutuhkan masyarakat. Sebab dengan adanya RS, Pasien asal Sidoarjo bisa ditangani langsung tanpa perlu rujuk ke luar kota. (eza/hen)

Jawa Pos

Satlantas Polresta Sidoarjo Dirikan Gerai Driver Ojol

SIDOARJO, SURYA - Polresta Sidoarjo melalui Satlantas Polresta Sidoarjo mendirikan Gerai Ojol Kamtibmas Mart di halaman Pos Polisi Sidoarjo. Itu dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara polisi dengan komunitas ojek online di Sidoarjo.

Begitu resmi dibuka, gerai yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan harian seperti nasi, roti, minuman, dan camilan ini langsung diserbu oleh para pengemudi ojek online. Antusiasme mereka terlihat sejak pagi, bahkan sebelum acara peresmian dimulai.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, menjelaskan inovasi ini menjadi wujud nyata kepedulian Polresta Sidoarjo ter-



SURYA / M. TAUFIK

GERAI OJOL - Sejumlah driver ojek online memanfaatkan gerai Ojol Kamtibmas Mart yang didirikan Polresta Sidoarjo.

hadap kesejahteraan dan keamanan para pengemudi ojek online di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pendirian Gerai Ojol Kamtibmas Mart merupakan bentuk dukungan nyata ter-

hadap komunitas ojek online yang selama ini turut membantu terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif.

"Rekan-rekan ojek online adalah mitra strategis Polri. Mereka bukan hanya penge-

mudi, tetapi juga bagian dari masyarakat yang aktif menjaga keamanan, melaporkan kejadian di lapangan, dan membantu kami dalam memberikan informasi," ujar Kapolresta.

Gerai ini dihadirkan sebagai bentuk kepedulian dan wadah kolaborasi. Harapannya, selain menjadi tempat belanja kebutuhan dengan harga terjangkau, gerai ini juga dapat menjadi pusat komunikasi dan pembinaan Kamtibmas bagi para ojol di Sidoarjo.

Kasat Lantas Polresta Sidoarjo, Kopol Jodi Indrawan, menjelaskan gerai ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi lalu lintas bagi para pengemudi ojek online.

"Melalui Gerai Ojol Kamtib-

mas Mart, kami ingin menghadirkan tempat yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga edukatif. Kami berikan sosialisasi tentang keselamatan berkendara, etika berlalu lintas, hingga pengetahuan dasar pertolongan pertama di jalan," terang Kopol Jodi.

Pihaknya menyadari para pengemudi ojek online memiliki peran penting dalam keselamatan berlalu lintas. Pihaknya ingin terus menjalin komunikasi yang baik dan membangun budaya tertib di kalangan mereka.

Para pengemudi ojek online yang hadir menyambut positif keberadaan gerai ini. Selain menyediakan kebutuhan harian dengan harga terjangkau. (ufl)

Proses Konfirmasi Penawaran LPSE di e-Katalog Lama

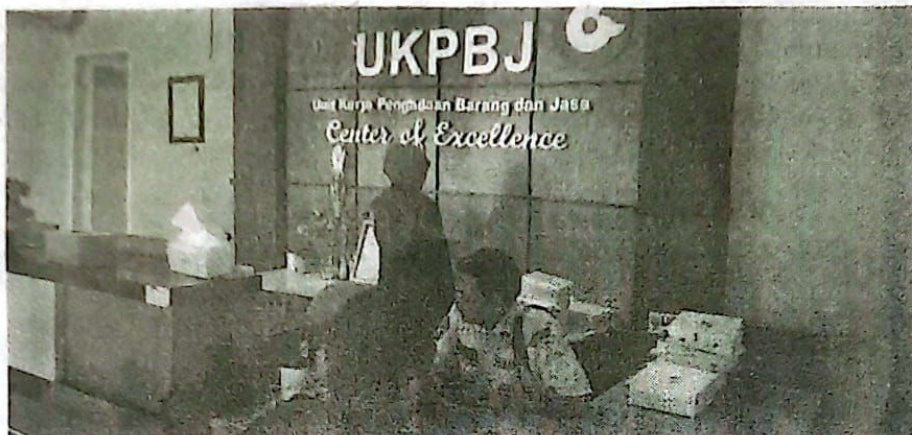
SIDOARJO - Proses konfirmasi penawaran dari penyedia jasa di sistem e-Katalog milik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sidoarjo dikeluhkan sejumlah pihak. Salah satunya disampaikan oleh wartawan Duta Masyarakat (duta.co) dan media lainnya, Senin (27/10/25).

Sebagai informasi, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan unit yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa secara profesional. Di tingkat kabupaten, UKPBJ berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

Loetfi dari Duta Masyarakat menyampaikan, proses konfirmasi penawaran di e-Katalog, khususnya pada versi 6, dinilai berjalan lambat.

"Misalnya kami menawarkan kerja sama publikasi melalui e-Katalog tanggal 2, tapi konfirmasinya bisa satu hingga tiga minggu baru ada respon," ungkapnya.

Ia berharap UKPBJ dapat mem-



DOK/LOETFI

Kantor UKPBJ Sidoarjo, Senin (27/10/25,

berikan penjelasan terkait kendala tersebut.

"Apakah ada kekurangan SDM atau kendala sistem? Apakah satu petugas menangani semua OPD? Kami berharap proses di e-Katalog bisa lebih cepat dan mudah sesuai tujuan awal sistem ini," tambahnya.

Sementara itu, Syaiful, salah satu petugas LPSE pada UKPBJ Sidoarjo, menjelaskan bahwa lamanya proses

konfirmasi bergantung pada petugas yang menangani.

"Terkait pengeklisan kenapa lama, itu tergantung tugasnya. Namun hal itu bukan wewenang saya," terang Syaiful.

Ia menjelaskan, dirinya hanya menangani bagian teknis pendaftaran pengguna sistem LPSE.

"Kalau soal pendaftaran pengguna, itu bagian saya. Tapi untuk konfirmasi penawaran bukan di wewenang saya. Kepala UKPBJ dan Kabid saat ini juga masih rapat," ujarnya.

Menurut Syaiful, UKPBJ berperan sebagai desk dari pusat yang membantu pengguna sistem untuk melakukan pendaftaran.

"Intinya, kami hanya membantu pengguna dalam proses pendaftaran. Untuk penawaran produk biasanya langsung ke OPD masing-masing," jelasnya. • Loe

DUTA

Jelang Sumpah Pemuda, Ketua DPRD Sidoarjo Ajak Generasi Muda Menjadi Pemuda Yang Multitalenta dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman



Liputan5news.com - Sidoarjo. Jelang peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2025 besok, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih mengajak generasi muda untuk terus mengembangkan diri agar mampu menjadi pemuda yang multitalenta dan adaptif terhadap perubahan zaman, terutama di era digital.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemuda masa kini tidak lagi sekadar berkaitan dengan kemampuan akademik atau fisik, melainkan juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial.

"Pemuda saat ini tidak bisa hanya dibekali satu atau dua keahlian saja. Mereka harus multitalenta. Kebutuhan zaman berubah cepat dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci," ujar Nasih sapaan akrabnya saat ditemui wartawan di ruang kerja Ketua DPRD Sidoarjo pada Senin (27/10/2025) sore.

Nasih mengungkapkan bahwa ancaman terhadap bangsa saat ini bukan hanya bersifat fisik seperti perang, melainkan juga ancaman yang muncul dari berbagai aspek kehidupan sosial.

"Hari ini ancaman terhadap negara bisa datang dari penyalahgunaan narkoba, bullying, hingga perundungan yang menyimpang. Karena itu, pemuda harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan semacam itu," ungkap Nasih.

Nasih pun menekankan bahwa pentingnya literasi digital di kalangan pemuda agar mampu memilah informasi yang benar ditengah derasnya arus media sosial. Ia pun menilai, kemampuan berinteraksi secara positif di dunia digital merupakan bagian dari kecakapan hidup modern yang wajib dimiliki setiap pemuda terutama Sidoarjo.

"Pemuda harus mampu menggunakan platform digital untuk hal-hal produktif, seperti inovasi, berwirausaha, serta berkontribusi di bidang pariwisata dan pemerintahan," imbuh Nasih.

"Yang tak kalah penting, mereka juga harus bijak dalam menyampaikan pendapat dan menyikapi kritik di dunia digital," tambahnya.

Nasih pun berharap semangat sumpah pemuda tidak hanya diperingati secara seremonial, melainkan diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata.

"Pemuda Sidoarjo harus menjadi agen perubahan yang tidak hanya cakan dalam ide dan teknologi, tetapi juga memiliki integritas dan semangat kebangsaan," pungkasnya (Yanti).